

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Jawa Timur

Nur Rohmah^{1*}, Magfirotul Hamdiah², Afifah Nadiyah N³, Matrix Erga Mahaputri⁴,
Sharlah Fadilah Ayu Saputri⁵, Fia Nadiya⁶, Sylvira Putri Islami⁷, Alfia Pingkan⁸

^{1,3,4,5,6,7,8}Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

²Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

*Corresponding Author: rohmah@unipasby.ac.id

Article history

Dikirim:

29-12-2025

Direvisi:

15-01-2026

Diterima:

16-01-2026

Key words:

pembinaan bahasa;
pengembangan bahasa;
ruang publik; PUEBI;
lanskap linguistik;
ejaan arkais.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam ruang publik di Jawa Timur melalui analisis linguistik pada tiga media utama, yaitu papan nama usaha, surat resmi, dan media pengumuman. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi visual, dan analisis teks berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Data dianalisis melalui reduksi, kategorisasi kesalahan, interpretasi konteks penggunaan bahasa, dan klasifikasi ke dalam ranah pembinaan atau pengembangan bahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia di ruang publik masih menghadapi sejumlah tantangan. Berbagai kesalahan kebahasaan ditemukan, antara lain penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, penulisan kata depan *di* yang tidak dipisah, kesalahan tanda baca, penggunaan istilah asing yang tidak diserap, dan inkonsistensi akronim pada dokumen formal. Fenomena ini mengindikasikan kurangnya pemahaman pelaku bahasa terhadap kaidah kebahasaan dan lemahnya pengawasan penggunaan bahasa dalam konteks publik. Sebaliknya, aspek pengembangan bahasa terlihat pada papan nama usaha UMKM yang memanfaatkan variasi linguistik secara kreatif. Penggunaan ejaan arkais seperti *Djadoel* dan *Sjahdoe* serta kosakata nonbaku seperti *Gress* menunjukkan adanya strategi branding yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga simbolik dan estetik. Bahasa digunakan sebagai sarana pembentukan identitas, penciptaan citra nostalgia, serta diferensiasi komersial dalam persaingan pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ruang publik menjadi arena pertemuan antara norma bahasa baku dan kreativitas linguistik masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan bahasa perlu dilakukan secara adaptif agar dapat menjaga standar kebahasaan tanpa menghambat dinamika inovasi bahasa yang berkembang di ruang publik.

PENDAHULUAN

Bahasa dan budaya adalah dua aspek dasar yang saling berhubungan dalam kehidupan sosial komunitas. Bahasa bukan sekadar sarana untuk berkomunikasi, tetapi juga berperan sebagai saluran untuk menyampaikan nilai-nilai, tradisi, serta identitas dari suatu kelompok budaya (Putri et al., 2025). Penerapan bahasa Indonesia di area publik telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang

Nomor 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bahasa Indonesia harus digunakan untuk nama bangunan, gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan, merek dagang, institusi usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia maupun badan hukum. Dalam pasal 38 ayat 1 juga telah dinyatakan bahwasanya bahasa wajib digunakan pada rambu-rambu umum, tanda jalan, fasilitas publik, spanduk, media informasi lain yang mendukung layanan publik. Dalam amanat Undang-undang tersebut penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman sebagai bentuk cerminan identitas bangsa.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik perlu dilandasi dengan penggunaan ejaan yang benar. Syarat penggunaan bahasa Indonesia harus memperhatikan tiga elemen utama yaitu ejaan, pilihan kata, dan tata bahasa. Ejaan adalah aturan yang menunjukkan bunyi (kata, kalimat, dsb) dalam bentuk tulisan (huruf-huruf) dan tanda baca. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada kategori ejaan, yaitu penggunaan ejaan, penulisan kata, penggunaan partikel, penggunaan ragam bahasa, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, penggunaan tanda baca, dan penggunaan imbuhan yang meliputi imbuhan awal, tengah, dan akhir (Jambi et al., 2023).

Penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik merupakan cermin kompetensi berbahasa masyarakat sekaligus indikator keberhasilan pembinaan bahasa nasional. Ruang publik, seperti papan nama usaha, surat resmi, dan media pengumuman, menjadi arena nyata pemakaian bahasa yang dapat diamati secara langsung oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tata bahasa yang baik dan kosakata yang tepat. Kehadiran Bahasa Indonesia di ruang publik memiliki fungsi yang strategis selain sebagai alat komunikasi formal juga simbol identitas negara (Humaeroh et al., 2023).

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih menghadapi banyak hambatan. Ketidaktepatan ejaan, pilihan diksi tidak baku, dan pencampuran bahasa asing dengan bahasa Indonesia sering ditemukan pada papan nama usaha dan reklame (Humaeroh et al., 2023). Selain itu, lemahnya kepatuhan terhadap UU mengakibatkan ruang publik tidak sepenuhnya mencerminkan karakter bahasa negara yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat luas (Yudin et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan penjualan lebih diutamakan dibandingkan pematuhan kebahasaan sehingga bahasa yang digunakan cenderung tidak diejawantahkan sesuai kaidah. Ragam Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu baku dan formal, namun tetap menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang digunakan pun harus mengandung keunikan dan menunjukkan ciri khas.

Di sisi lain, fenomena pemakaian bentuk ejaan lama seperti *dj*, *tj*, atau *sj* pada papan nama UMKM, sebagaimana ditemukan dalam media komersial di Jawa Timur, merupakan bentuk kreativitas linguistik yang tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan murni. Praktik ini bertujuan membangun identitas lokal, citra nostalgia, dan keunikan branding, sehingga termasuk ranah pengembangan bahasa (Angelita, 2025). Dari perspektif teori linguistik landscape yang dikemukakan Landry dan Bourhis 1997, bahasa yang ditampilkan pada ruang publik bukan hanya alat informasi, melainkan juga representasi ideologi, status, dan identitas sosial. Oleh karena itu, ruang publik menjadi arena negosiasi antara bahasa Indonesia sebagai

bahasa resmi dan bahasa lain sebagai strategi komersial, budaya, maupun pariwisata sebagai bahasa resmi dan bahasa lain sebagai strategi komersial, budaya, maupun pariwisata (Nusi & Aditiawarman, 2024).

Penelitian ini memiliki kebaruan pada integrasi analisis pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia melalui tiga jenis teks ruang publik secara bersamaan, sehingga hasil kajian memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika kebahasaan di Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik dan menganalisis implikasinya terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa nasional.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

Pembinaan bahasa Indonesia adalah satu usaha yang dilakukan dengan sadar terencana dan sistematis mengenai peningkatan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakainya memiliki kebanggaan dan kegairahan untuk menggunakannya. pengembangan bahasa adalah usaha yang dilakukan dengan sadar terencana dan sistematis mengenai mutu dan kelengkapan bahasa yang bersangkutan sehingga bahasa itu dapat digunakan dengan efektif sesuai dengan kedudukan dan fungsinya di masyarakat (Winarsih, 2022).

Bahasa Indonesia saat ini mengalami perkembangan, baik dari luas wilayah para pengguna maupun struktur bahasanya. Oleh karena itu, bila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia ke depan akan menjelma menjadi bahasa modern yang bermartabat, bahasa yang kaya kosakata dan berstruktur mantap sesuai dengan kebijakan bahasa nasional (Paryono, 2013). Sejalan dengan tujuan pembinaan bahasa Indonesia yakni menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia, dan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia (Dewantara et al., 2017).

Bahasa Baku dan Kaidah Kebahasaan

Bahasa Indonesia baku merupakan bahasa dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (Erwina, 2024). Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri yaitu memiliki kemantapan dinamis, artinya kaidah bahasa Indonesia relatif tetap serta tidak berubah setiap saat. Maka, kaidah bahasa Indonesia harus dapat diterapkan ke semua gejala yang ada di dalam bahasa Indonesia. Setiap bahasa mengalami perkembangan begitu juga dengan bahasa Indonesia, maka kaidah bahasa Indonesia juga berlaku untuk unsur bahasa yang baru muncul. Bahasa Indonesia baku juga memiliki ciri cendikia, artinya bahasa Indonesia baku mencerminkan cara berpikir yang teratur, logis dan sistematis.

Dalam penulisan harus patuh pada seperangkat aturan yang disebut dengan ejaan. Ejaan merupakan keseluruhan kaidah yang menggambarkan lambang bunyi ujaran serta hubungan antar lambang tersebut (pemisahan dan penggabungannya) dalam suatu bahasa. Ejaan yang disempurnakan mencakup empat aspek, yaitu (1) penggunaan huruf, (2) penulisan kata, (3) penggunaan tanda baca, dan (4) penulisan

unsur serapan. Dalam bahasa tulis, kesalahan ejaan masih sering ditemukan, termasuk dalam nama papan, pengumuman, dan dokumen resmi. Kesalahan ejaan tersebut meliputi kesalahan penggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca (Awaliyah, 2025).

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) adalah norma resmi yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menjadi acuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. PUEBI berperan sebagai pedoman utama dalam pengembangan bahasa, khususnya dalam mengenali serta mengoreksi kesalahan ejaan dalam dokumen tertulis di tempat umum, seperti nama papan, pengumuman, dan dokumen resmi.

Pembinaan Bahasa di Ruang Publik

Bahasa merupakan alat komunikasi dalam menyampaikan pesan baik tertulis maupun lisan. Penggunaan Bahasa yang baik dan benar dapat membantu dalam proses komunikasi secara lancar (Alfaruqy et al., 2025). Bahasa dalam suatu negara memiliki perencanaan yang strategis, tidak tergesa-gesa semua bersifat ilmiah supaya tetap sebagai pemersatu keberagaman (Silvia, 2018).

Ruang publik merupakan arena yang kaya untuk mengkaji penggunaan bahasa, representasi budaya, dan interaksi sosial. Konsep lanskap linguistik (*linguistic landscape/LL*) yang diperkenalkan oleh Landry dan Bourhis (1997) merujuk pada bahasa-bahasa yang tampak di ruang publik, seperti papan informasi, spanduk, iklan, dan bentuk komunikasi tertulis lainnya. Lanskap linguistik memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai sarana komunikasi praktis dan sebagai representasi simbolik identitas sosial (Adawiyah et al., 2025).

Ruang publik bersifat strategis dalam pengembangan bahasa. Bahasa menjadi sarana komunikasi yang dapat dijangkau dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Kehadiran bahasa di ruang publik baik melalui papan informasi, dokumen resmi, maupun media layanan berfungsi sebagai contoh konkret penerapan bahasa Indonesia (Nurlaili et al., 2023). Dengan demikian, mutu bahasa di ruang publik memiliki dampak langsung pada pembentukan sikap berbahasa masyarakat, karena teks publik sering dijadikan acuan tidak secara langsung oleh para pembacanya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan November s.d. Desember 2025 di beberapa kota di Jawa Timur. Objek penelitian berupa teks kebahasaan yang terdapat dalam ruang publik, meliputi papan nama usaha, surat resmi institusi, dan pengumuman layanan publik. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, dokumentasi visual (foto), dan analisis teks. Instrumen observasi digunakan untuk mencatat jenis media, konteks penggunaan, dan fungsi bahasa dalam ruang publik. Dokumentasi visual berfungsi sebagai data primer yang memastikan keakuratan teks. Analisis teks difokuskan pada beberapa aspek kebahasaan, yaitu ejaan dan tanda baca penulisan huruf kapital, penggunaan kata depan, pilihan kata atau diksi, konsistensi istilah atau akronim, serta fungsi bahasa dalam konteks pembinaan dan pengembangan bahasa.

Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, pengelompokan temuan kebahasaan, penafsiran konteks penggunaan bahasa, serta klasifikasi data ke dalam ranah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan mengacu pada



Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Penelitian ini menganalisis 15 teks ruang publik, yang terdiri atas 7 papan nama usaha, 5 surat resmi, dan 3 pengumuman publik. Jumlah data tersebut dianggap cukup representatif untuk menggambarkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini menyajikan temuan penelitian mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di Jawa Timur berdasarkan data teks yang dianalisis, meliputi papan nama usaha, surat resmi institusi, dan pengumuman layanan publik. Pembahasan difokuskan pada dua ranah utama, yaitu pembinaan bahasa yang berkaitan dengan kesesuaian penggunaan bahasa terhadap kaidah PUEBI serta pengembangan bahasa yang tercermin melalui kreativitas linguistik dalam ruang publik. Setiap temuan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menunjukkan bentuk, pola, serta implikasi penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks sosial, administratif, dan komersial.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya pelanggaran bahasa Indonesia di ruang publik tidak hanya berupa kesalahan teknis, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah. Kondisi ini tampak pada teks layanan publik, yaitu papan pengumuman layanan *laundry* yang menjadi objek kajian penelitian ini. Pada teks tersebut menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian dengan kaidah bahasa baku, baik aspek ejaan, pilihan kata, maupun struktur kalimat.



Gambar 1. Papan layanan *laundry*

Hasil temuan menunjukkan bahwa penggunaan bahasa pada papan pengumuman tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku. Beberapa temuan ketidaksesuaian dalam papan pengumuman layanan *laundry*.

Table 1. Kesalahan pada Papan Pengumuman *Laundry*

No	Segmen teks	Kaidah yang Dilanggar	Perbaikan
1	Syarat & ketentuan	Penggunaan simbol & sebagai penghubung dalam judul resmi.	Syarat dan ketentuan
2	dicucian anda	Penulisan kata depan <i>di-</i> (lokasi) dan penulisan kata ganti orang kedua.	di cucian Anda
3	dipintu mesin	Penulisan kata depan <i>di-</i> (lokasi).	di pintu mesin
4	performa optimal	Penggunaan kata serapan yang dapat digantikan dengan padanan baku.	kinerja optimal
5	dianjurkan sesuai jumlah cucian anda.	Redundansi kata dan penulisan kata ganti orang kedua.	dianjurkan berdasarkan jumlah cucian Anda.
6	cucian yang dapat luntur/yang tidak dapat	Penggunaan simbol / dan kesalahan spasi pada penulisan <i>di-</i> (aksi).	cucian yang dapat luntur, yang tidak dapat

No	Segmen teks	Kaidah yang Dilanggar	Perbaikan
	dicuci/ dengan mesin	dikeringkan	dicuci, dikeringkan atau dengan mesin
7	perihal mesin kami sebelum anda meninggalkan area laundry	Penggunaan kata ganti orang kedua dan istilah asing yang tidak dicetak miring.	mengenai mesin kami sebelum Anda meninggalkan area laundry.
8	(kami tidak bertanggung jawab)	Penggunaan huruf kecil di awal klausa dalam tanda kurung.	(Kami tidak bertanggung jawab)
9	Tidak adanya tanda baca titik (.)	Beberapa poin instruksi tidak diakhiri dengan tanda baca titik.	Wajib diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Kesalahan yang ditemukan pada teks pengumuman layanan *laundry* menunjukkan beragam penyimpangan kaidah bahasa Indonesia. Penyimpangan tersebut tidak bersifat acak, melainkan membentuk pola sistematis yang mengindikasikan rendahnya pemahaman produsen teks terhadap fungsi dan struktur bahasa dalam konteks komunikasi formal. Informasi di ruang publik merupakan komunikasi secara tertulis yang dibaca secara umum. Informasi yang jelas haruslah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar tidak terjadi ambiguitas dalam pemahaman seseorang ketika membaca, terutama ketika berbicara tentang teks tertulis yang digunakan di ruang publik (Sucipta et al., 2024).

Kesalahan ini berkaitan dengan tiga ranah utama dalam linguistik terapan, yaitu morfologi, grafologi/ejaan, dan leksikon. Pertama, pelanggaran Grafologi dan Ejaan. Kesalahan seperti “Syarat & ketentuan” mencerminkan ketidaktepatan dalam memilih tanda hubung. Penggunaan simbol ampersand (&) bukan bagian dari kaidah penulisan baku karena ejaan bahasa Indonesia mengutamakan kata penghubung *dan*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bahasa lebih mengedepankan kepraktisan visual daripada ketepatan ortografis. Perbaikannya menjadi “Syarat dan ketentuan” merupakan upaya untuk menegakkan prinsip kebakuan dalam penulisan istilah prosedural.

Kesalahan yang sama terlihat pada “(kami tidak bertanggung jawab)” yang mengawali klausa dengan huruf kecil. Dalam PUEBI, huruf kapital wajib digunakan pada awal kalimat atau klausa yang berdiri sendiri, meskipun berada di dalam tanda kurung. Pembetulannya menjadi “(Kami tidak bertanggung jawab)” tidak hanya memperbaiki ejaan, tetapi juga mempertegas posisi kalimat sebagai pernyataan formal. Tidak adanya tanda baca titik pada akhir instruksi juga merupakan pelanggaran kaidah tanda baca. Dalam konteks teks prosedural, titik berfungsi sebagai penanda batas informasi. Kelalaian ini menimbulkan implikasi pragmatis: pembaca dapat menganggap instruksi tersebut belum selesai atau ambigu.

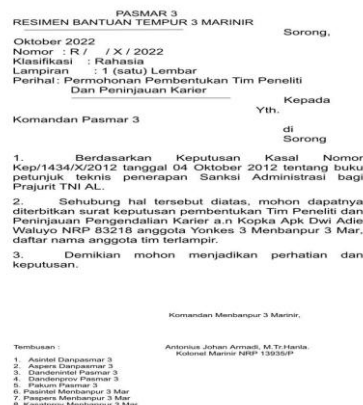
Kedua, ketidaktepatan penulisan kata depan *di*. Kesalahan “dicucian anda” dan “dipintu mesin” menunjukkan kebingungan penulis dalam membedakan fungsi morfemis *di* sebagai kata depan (dipisah) dan prefiks (digabung). Kesalahan ini bukan sekadar teknis, tetapi mengaburkan informasi ruang (*lokasi*) dan tindakan (*aksi*). Dengan demikian, perbaikannya menjadi “di cucian Anda” dan “di pintu mesin” menegaskan perbedaan semantis antara objek dan tindakan dalam teks prosedural. Fenomena ini merupakan salah satu kesalahan paling umum dalam ruang publik karena terkait dengan perkembangan bahasa digital, di mana konsumen terbiasa menggunakan bentuk singkat tanpa memperhatikan konsistensi ejaan.

Ketiga, kesalahan leksikal dan pilihan padanan. Segmen “performa optimal” memperlihatkan penggunaan istilah serapan Inggris *performance* yang belum sepenuhnya dibakukan dan masih memiliki padanan baku bahasa Indonesia, yaitu “kinerja”. Penggantian istilah asing dengan padanan baku membantu menghindari dominasi bahasa asing dalam ruang publik dan memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengetahuan dan administrasi. Kalimat “dianjurkan sesuai jumlah cucian anda.” mengandung dua kesalahan sekaligus: redundansi frasa yang mengganggu efisiensi bahasa, serta penulisan kata ganti *Anda* yang tidak sesuai norma kapitalisasi. Perbaikan menjadi “dianjurkan berdasarkan jumlah cucian Anda.” membuat informasi lebih ekonomis sekaligus menaikkan tingkat formalitas bahasa.

Keempat, kesalahan sintaksis dan struktur informasi. Segmen “cucian yang dapat luntur/yang tidak dapat dicuci/ dikeringkan dengan mesin” menunjukkan struktur sintaksis yang tidak paralel dan penggunaan simbol “/” yang lazim dalam konteks informal, tetapi tidak dapat digunakan dalam teks instruksional resmi. Perbaikan “cucian yang dapat luntur, yang tidak dapat dicuci, atau dikeringkan dengan mesin” memperjelas tiga alternatif kondisi cucian secara sistematis. Serangkaian kesalahan ini berdampak pada pemaknaan instruksi, karena informasi yang seharusnya bersifat preskriptif berubah menjadi multitafsir akibat kurangnya kohesi dan penanda logis.

Kesalahan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam menggunakan ejaan yang mengatur cara melambangkan bunyi ujaran serta penggunaannya dalam bahasa tulis. Pemilihan kata dalam suatu ragam bahasa berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian kata yang digunakan. Ketepatan pemilihan kata berhubungan dengan penggunaan kata yang sesuai dengan makna yang hendak disampaikan, sedangkan kesesuaian pemilihan kata berkaitan dengan situasi dan konteks penggunaan bahasa. Selain itu, struktur bahasa berkaitan penyusunan kata membentuk kalimat. (Wirahyuni, 1979).

Sebagai pembanding terhadap penerapan bahasa Indonesia dalam konteks publik, analisis ini juga mengevaluasi pemakaian bahasa pada dokumen resmi institusi. Fokus kajian adalah sebuah surat resmi dari militer yang termasuk dalam kategori naskah dinas, sehingga seyogianya harus sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baku, tata cara penulisan surat resmi, serta etika administratif. Meskipun secara umum dokumen ini telah menggunakan bentuk bahasa formal dengan baik, ternyata masih ada beberapa penyimpangan terkait dengan kejelasan bahasa, pemilihan kata, penulisan ejaan, dan konsistensi dalam penulisan.



Gambar 2. Surat Resmi

Penggunaan bahasa dalam dokumen ini, yang merupakan naskah dinas resmi militer, sudah cukup sesuai dengan ragam bahasa formal dan struktur surat dinas. Namun, ditemukan beberapa kesalahan minor yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar (PUEBI/EBI) yang memerlukan perbaikan.

Table 2. Identifikasi Kesalahan Kebahasaan Surat Resmi

No	Segmen teks	Perbaikan
1	Redundansi Alamat: Terdapat frasa "Yth. Kepada..."	Seharusnya dipilih salah satu saja, misalnya: Yth. Komandan Pasmar 3 (menghilangkan "Kepada").
2	Diksi Tidak Baku: Penggunaan "Sehubung hal tersebut diatas,"	Frasa baku adalah: Sehubungan dengan hal tersebut, (dan di atas seharusnya dipisah).
3	Kapitalisasi: Kata "Dan" pada Perihal ("Tim Peneliti Dan Peninjauan Karier")	Kata hubung di tengah judul/perihal seharusnya ditulis huruf kecil: dan.
4	Frasa Penutup: "Demikian mohon menjadi perhatian dan keputusan."	Kalimat penutup ini kurang baku/lazim. Lebih formal: Demikian permohonan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum.
5	Konsistensi Akronim: Inkonsistensi penulisan nama satuan di bagian tembusan (misalnya Paspamar 3 vs Pasmar 3).	Seluruh akronim harus ditulis konsisten sesuai standar resmi satuan.

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan adanya beberapa bentuk penyimpangan kaidah kebahasaan yang berkaitan dengan efisiensi bahasa, pilihan diksi, ejaan, dan konsistensi bentuk akronim. Kesalahan tersebut bukan hanya bersifat teknis, melainkan mencerminkan ketidaksesuaian dengan norma bahasa Indonesia baku sebagaimana telah diatur dalam pedoman resmi bahasa, sehingga berpotensi memengaruhi kredibilitas dokumen administrasi.

Frasa "Yth. Kepada..." mengandung redundansi karena kedua unsur tersebut memiliki fungsi sama sebagai penanda sapaan resmi. Oleh karena itu, bentuk baku yang dianjurkan cukup "Yth. Komandan Pasmar 3" tanpa tambahan *kepada*. Penghilangan unsur redundan ini memperbaiki struktur kalimat dan memperkuat efektivitas komunikasi resmi. Ruang lingkup Ejaan Bahasa Indonesia yang penting diperhatikan dalam penulisan surat resmi meliputi pemakaian huruf, penulisan huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Penulisan huruf kapital membuat surat lebih etis dan jelas, sedangkan pemakaian tanda baca lebih memperjelas, mempermudah, dan mampu menimbulkan penafsiran yang sama dengan maksud yang diinginkan penulisnya. Sebaliknya, penggunaan huruf kapital yang tidak tepat mengakibatkan surat tidak etis dan tidak jelas (Subangun, 2023).

Bentuk "Sehubung hal tersebut diatas," melanggar dua kaidah sekaligus: penggunaan diksi yang tidak lengkap (*sehubung* → *sehubungan dengan*) dan penulisan kata depan *di* yang semestinya dipisah ketika menunjukkan keterangan tempat (*di atas*), bukan digabung. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menegaskan bahwa kata depan *di* harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Kesalahan ini menunjukkan kurangnya pemahaman penulis mengenai hubungan morfologis dan makna dalam frasa preposisional.

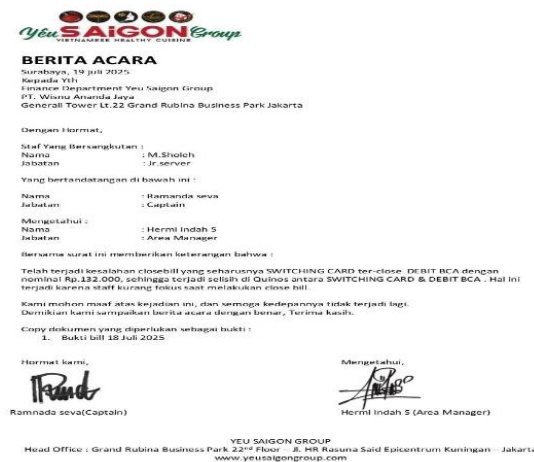
Penulisan huruf kapital pada kata hubung "Dan" dalam frasa "Tim Peneliti Dan Peninjauan Karier" bertentangan dengan ketentuan kapitalisasi. Kata hubung tidak ditulis kapital apabila berada di tengah frase atau judul. Perbaikan yang tepat ialah

"Tim Peneliti dan Peninjauan Karier". Kesalahan ini menunjukkan ketidakcermatan dalam menerapkan prinsip grafemik dalam penulisan judul institusional.

Frasa penutup "Demikian mohon menjadi perhatian dan keputusan." tidak sesuai dengan kelaziman bahasa administrasi. Surat resmi harus memiliki penutup yang bersifat jelas dan komunikatif, misalnya "Demikian permohonan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan maklum." Penyesuaian ini bukan hanya memperbaiki struktur kalimat, tetapi juga meningkatkan tingkat formalitas sesuai etika bahasa birokrasi.

Inkonsistensi penulisan akronim seperti "Paspamar 3" dan "Pasmar 3" menunjukkan pelanggaran aturan standardisasi bentuk singkatan. Akronim dalam dokumen resmi harus konsisten agar tidak menimbulkan ambiguitas referensial. Konsistensi ini penting dalam dokumen institusional karena menyangkut identitas organisasi dan keabsahan dokumen.

Sebagai bagian dari kajian penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen administrasi, analisis berikut difokuskan pada sebuah surat berita acara yang digunakan dalam konteks perkantoran. Berita acara merupakan dokumen resmi yang memiliki fungsi penting sebagai bukti tertulis suatu peristiwa atau tindakan administratif, sehingga penulisannya dituntut untuk mematuhi kaidah bahasa Indonesia baku secara konsisten. Oleh karena itu, penggunaan ejaan, kapitalisasi, diksi, serta istilah yang tepat menjadi aspek krusial dalam menjaga kejelasan informasi dan kredibilitas institusi. Analisis terhadap Berita Acara Salah Tutup Struk yang ditampilkan pada Gambar 3 bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan kebahasaan yang masih muncul, sekaligus menilai tingkat kepatuhan dokumen tersebut terhadap Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan konvensi bahasa administrasi.



Gambar 3. Surat Berita Acara

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa meskipun secara umum surat tersebut telah menggunakan ragam bahasa Indonesia yang formal, masih ditemukan sejumlah penyimpangan kaidah bahasa, khususnya pada aspek ejaan, kapitalisasi, penulisan istilah, dan penggunaan diksi. Kesalahan-kesalahan tersebut menunjukkan bahwa penyusun surat belum menerapkan prinsip kebakuan bahasa Indonesia secara konsisten sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Surat dapat diidentikkan dengan lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Artinya, sebuah institusi dapat diketahui dari surat yang dikeluarkan, baik

dari segi format, sistematika, maupun bahasa (Herawati, 2019). Dalam konteks administrasi perkantoran, penggunaan bahasa baku tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merepresentasikan profesionalitas, akurasi informasi, dan kredibilitas institusi.

Kesalahan pertama terlihat pada aspek ejaan dan huruf kapital, seperti penulisan kata "surat" pada bagian awal dokumen yang semestinya ditulis dengan huruf kapital "Surat" karena berada pada posisi awal judul. Hal ini sejalan dengan aturan penggunaan huruf kapital dalam PUEBI yang menegaskan bahwa huruf kapital dipakai pada huruf pertama setiap judul atau kalimat. Demikian pula, pencantuman titik pada akhir penulisan tanggal "19 Juli 2025." merupakan bentuk yang tidak diperlukan karena penulisan tanggal formal tidak diakhiri tanda baca apa pun. Kesalahan serupa terdapat pada frasa "Hormat kami," yang seharusnya ditulis "Hormat kami." tanpa tanda koma, mengingat frasa tersebut merupakan bagian penutup surat resmi, bukan penggalan kalimat.

Pada bagian alamat, redundansi ditemukan dalam penggunaan "Kepada Yth.". Bentuk tersebut melanggar prinsip efisiensi bahasa karena memadukan dua ungkapan dengan fungsi sama. Pemilihan salah satu bentuk, yaitu "Yth." saja sudah dianggap cukup untuk menandai pihak yang dituju dalam surat resmi. Selain itu, penulisan singkatan "Jl." dan "Lt." juga tidak sesuai konteks formal karena dalam surat dinas *singkatan non-baku sebaiknya dihindari* dan diganti dengan bentuk lengkap, yakni "Jalan" dan "Lantai". menegaskan bahwa ragam tulis resmi wajib mengutamakan bentuk lengkap untuk menghindari ambiguitas dan menjaga ketepatan informasi.

Kesalahan lain yang cukup krusial berkaitan dengan pemakaian istilah asing dalam surat, seperti "closebill", "switching card", dan "ter-close". Padanan Indonesia untuk istilah tersebut tersedia dan seharusnya digunakan, misalnya "tutup tagihan", "kartu pengganti", serta "ditutup" atau "tertutup". Kehadiran istilah asing yang tidak diserap menunjukkan ketidaksesuaian dengan kaidah pemadanan istilah yang dianjurkan dalam pembakuan bahasa Indonesia, yaitu mendahulukan padanan lokal sebelum menggunakan bentuk asing. Demikian pula kesalahan penulisan nominal "Rp. 132.000,-" bertentangan dengan aturan penulisan angka rupiah yang baku, yaitu "Rp132.000,00" tanpa tanda titik setelah Rp dan tanpa tanda koma setelah tiga digit terakhir (Winarsih, 2022). Kesalahan ini bersifat substantif karena menyangkut informasi finansial yang tidak boleh multitafsir.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesalahan pengetikan seperti "Buki" yang semestinya "Bukti", serta kesalahan spasi dalam frasa "sebagai berikut :". Kesalahan mikro seperti ini tetap berdampak pada persepsi pembaca dan menunjukkan kurangnya ketelitian dalam penyusunan dokumen resmi. Hal-hal kecil dalam ejaan dan format penulisan memiliki implikasi besar karena surat bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga *artefak administratif* yang menyimpan nilai legal-formal suatu institusi.

Selain kesalahan kebahasaan yang bersifat normatif, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga memperlihatkan fenomena kreatif yang berkaitan dengan strategi identitas dan estetika linguistik. Pada konteks tertentu, penyimpangan dari kaidah bahasa baku tidak selalu dimaknai sebagai kesalahan, melainkan sebagai pilihan sadar yang memiliki fungsi simbolik dan persuasif. Fenomena tersebut tampak pada papan nama usaha yang memadukan unsur bahasa baku dengan bentuk nonbaku untuk membangun citra dan daya tarik tertentu. Salah satu contohnya

adalah papan nama “Kangen Djadoel”. Analisis berikut mengkaji bagaimana pemilihan diksi dan ejaan pada papan nama tersebut berfungsi sebagai strategi semiotik yang merepresentasikan nostalgia budaya sekaligus membangun identitas usaha di ruang publik.



Gambar 4. Papan Nama *Kangen Djadoel*

Data di atas menunjukkan bahwa ruang publik di Jawa Timur tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi sebagai arena negosiasi identitas linguistik. Papan nama seperti *Kangen Djadoel* memadukan kosakata modern *kangen* dengan ejaan arkais *Djadoel*. Penggunaan ejaan *dj* yang merupakan relik historis pra-EYD, menandakan bahwa pelaku usaha memanfaatkan representasi visual bahasa untuk memproduksi nostalgia budaya, bukan sekadar memberi nama usaha. Kajian terhadap papan nama “Kangen Djadoel” menunjukkan bahwa pemilik usaha tidak sekadar menggunakan bahasa sebagai alat penanda identitas usaha, tetapi juga sebagai strategi semiotik yang memadukan unsur modernitas dan nostalgia. Secara leksikal, kata “Kangen” merupakan kosakata baku dalam bahasa Indonesia kontemporer yang bermakna rindu atau merasakan keinginan untuk kembali pada sesuatu yang pernah dialami. Penggunaan kata ini menunjukkan kedekatan emosional dan relevansi makna bagi pembaca modern, sekaligus menegaskan bahwa sebagian elemen nama tetap berada dalam koridor bahasa Indonesia baku. Sependapat dengan (Hindu et al., 2023) bahwa bahasa yang digunakan di ruang publik berfungsi sebagai sarana penyampai pesan sekaligus representasi kekuatan sosial dan budaya.

Bagian kedua dari nama tersebut, yaitu “Djadoel”, merupakan ejaan arkais dari kata *jadul*, yang berasal dari frasa *jaman dulu/zaman dahulu*. Penggunaan huruf “dj” sebagai representasi bunyi /j/ merupakan ciri khas ortografi bahasa Indonesia sebelum diberlakukannya *Ejaan yang Disempurnakan (EYD)* pada tahun 1972. Sebelum reformasi ejaan tersebut, bentuk seperti *Djakarta*, *djoega*, dan *madjalah* lazim digunakan dalam ruang tulis formal. Dengan demikian, pemakaian “Djadoel” dalam papan nama ini tidak dapat dipahami sebagai kesalahan ejaan, melainkan sebagai pilihan linguistik yang intentional, yaitu menghadirkan efek historis atau nuansa vintage melalui manipulasi ortografis. Dengan demikian, variasi ejaan dapat digunakan sebagai penanda konteks sosial-budaya, bukan semata-mata sebagai representasi kaidah formal bahasa.

Jika dilihat dari perspektif klasifikasi upaya bahasa, penggunaan nama “Kangen Djadoel” dapat dipahami melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi bentuk (ejaan), yaitu pengadopsian kembali ejaan lama sebagai strategi estetika linguistik.

Dalam kasus ini, huruf “dj” bukan sekadar ornamen, tetapi sebuah simbol grafemik yang mengaktifkan memori budaya kolektif pembaca mengenai masa lampau. Kedua, dimensi makna (semantik). Gabungan antara kata “Kangen” (kontemporer) dan “Djadoel” (arkais) menciptakan konotasi temporal ganda antara masa kini dan masa lalu. Secara denotatif, frasa ini dapat dimaknai sebagai “rindu masa lampau”, sedangkan secara konotatif ia membangun karakter ruang yang memikat, akrab, dan emosional. Dengan demikian, nama “Kangen Djadoel” bukan sekadar label, tetapi sekaligus narasi identitas. Ketiga, dimensi fungsi (pragmatik). Penggunaan ejaan nonbaku dalam konteks ini adalah strategi branding yang dirancang untuk membangun diferensiasi pasar. Dalam kajian wacana bisnis, nama yang unik, mudah diingat, dan memiliki makna emosional akan memperkuat positioning merek di benak konsumen. Melalui struktur nama tersebut, pemilik usaha tidak hanya menyampaikan layanan yang ditawarkan, melainkan menciptakan pengalaman kultural yang melekat pada konsumen.

Secara keseluruhan, penggunaan nama “Kangen Djadoel” menunjukkan bahwa ruang publik bukan hanya arena pembinaan bahasa baku, tetapi juga laboratorium kreativitas linguistik, tempat bahasa mengalami eksplorasi bentuk, fungsi, dan makna. Pilihan bentuk ejaan lama yang disandingkan dengan kosakata modern tidak lagi sekadar penyimpangan normatif, melainkan strategi identitas yang mempertegas karakter bisnis berbasis nostalgia. Temuan ini menguatkan konsep bahwa bahasa, selain sebagai sistem tanda, juga merupakan instrumen estetika dan ideologi yang berfungsi membangun citra sosial.

Berbeda dengan kasus pembinaan yang bersifat korektif, temuan pada papan nama UMKM justru menunjukkan adanya inovasi semiotik. Kata *Sjahdoe* yang diturunkan dari *syahdu*, dan *Gress* yang merupakan adaptasi leksikal Jawa, merupakan hasil kreasi linguistik yang memperkaya daya ekspresif bahasa Indonesia di ranah publik.



Gambar 5. Papan Nama Kedai Kopi Gress Sjahdoe

Penggunaan nama “Gress Sjahdoe” pada papan nama usaha mencerminkan fenomena kebahasaan yang menarik dalam lanskap linguistik ruang publik, khususnya pada ranah komersial. Nama tersebut memperlihatkan adanya percampuran bentuk bahasa yang tidak sepenuhnya mengikuti kaidah ejaan baku sebagaimana ditentukan dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*, namun tetap memiliki fungsi komunikatif yang kuat dalam konteks branding dan identitas usaha.

Secara grafemik, unsur nama “Sjahdoe” tidak sesuai dengan kaidah ejaan kontemporer. Penggunaan graf “sj” sebagai representasi fonem /sy/ merupakan ciri ortografi lama yang dikenal sebagai Ejaan van Ophuijsen, yaitu sistem ejaan yang berlaku di Indonesia sebelum diberlakukannya reformasi ejaan pada tahun 1947. Dalam sistem ejaan tersebut, beberapa fonem bahasa Indonesia direpresentasikan dengan huruf ganda, seperti *tj* untuk /c/, *nj* untuk /ɲ/, dan *sj* untuk /ʃ/ atau /sy/. Namun, setelah pengesahan Ejaan Republik dan kemudian Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972, penggunaan graf tersebut dihapus dan diganti dengan bentuk yang lebih sederhana dan sistematis. Dengan demikian, penulisan “Sjahdoe” dalam konteks saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk baku karena bentuk yang benar sesuai PUEBI adalah “Syahdu”.

Meski demikian, pemilihan bentuk ejaan arkais ini tidak dapat dipandang sebagai kesalahan linguistik semata. Dalam perspektif sociolinguistik, penyimpangan terhadap sistem ejaan baku dapat menjadi strategi simbolik untuk menghadirkan citra historis atau estetika tertentu. Dengan memilih bentuk “Sjahdoe”, pemilik usaha melakukan komodifikasi nostalgia, yaitu memanfaatkan unsur bahasa kuno untuk menciptakan asosiasi emosional terhadap sesuatu yang autentik, berkelas, atau bernilai tradisional. Hal ini sejalan dengan fenomena revitalisasi bentuk ejaan lama yang banyak ditemui pada nama usaha yang mengusung konsep retro, klasik, atau heritage.

Berbeda halnya dengan unsur kedua “Gress”, yang meskipun populer dalam tuturan masyarakat Jawa Timur, tidak tergolong sebagai kosakata baku bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk ragam tidak resmi yang berarti “baru”, “segar”, atau “keren”. Ketidakbakuan ini memperlihatkan bahwa papan nama usaha sering menjadi wahana kreativitas linguistik yang tidak tunduk sepenuhnya pada norma kebahasaan formal, karena orientasi utamanya adalah persuasi dan pencitraan, bukan ketertiban bahasa.

Jika dilihat dalam kerangka pragmatik bahasa, nama “Gress Sjahdoe” bukan sekadar penanda identitas usaha, tetapi juga merupakan strategi branding linguistik. Pemilihan kosakata non-baku dan ejaan lama ini berfungsi untuk membangun citra tertentu dalam benak konsumen, terutama mereka yang mengasosiasikan pengalaman emosional dengan unsur klasik atau tradisional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Jawa Timur menunjukkan dua kecenderungan utama yang berjalan berdampingan, yaitu pembinaan bahasa yang masih belum optimal dan pengembangan bahasa yang berkembang secara kreatif. Pada ranah pembinaan, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan kebahasaan, mulai dari kesalahan ejaan, kapitalisasi, pemilihan diksi, penulisan kata depan, penggunaan simbol, hingga inkonsistensi akronim pada surat resmi dan pengumuman layanan publik. Kesalahan-kesalahan tersebut bukan semata pelanggaran teknis, tetapi mencerminkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap kaidah PUEBI serta minimnya kesadaran terhadap fungsi bahasa Indonesia sebagai representasi identitas nasional di ruang publik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan bahasa masih perlu ditingkatkan, terutama di sektor nonpendidikan, melalui edukasi berkelanjutan,



sosialisasi kebijakan kebahasaan, serta pengawasan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Di sisi lain, temuan pada papan nama UMKM memperlihatkan dinamika pengembangan bahasa yang berlangsung secara organik. Penggunaan unsur ejaan arkais seperti *Djadoel* dan *Sjahdoe*, serta kosakata nonbaku seperti *Gress*, menunjukkan bahwa pelaku usaha menggunakan bahasa bukan sekadar sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai strategi semiotik untuk membangun identitas, menumbuhkan citra nostalgia, dan memperkuat daya tarik komersial. Kreativitas linguistik ini memperkaya khazanah ekspresi bahasa Indonesia di ruang publik dan menjadi bukti bahwa bahasa terus hidup, beradaptasi, dan berkembang sesuai kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, bahasa Indonesia dalam ruang publik Jawa Timur berada pada titik temu antara norma dan inovasi. Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai medium penyampaian informasi, tetapi juga arena negosiasi ideologi kebahasaan antara tuntutan formalitas negara dan kreativitas masyarakat. Keberlanjutan pembinaan bahasa Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kontekstual, komunikatif, dan adaptif, agar peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa terjaga tanpa menghambat perkembangan ekspresi linguistik masyarakat yang dinamis. Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai relasi antara kebijakan bahasa, praktik sosial, dan konstruksi identitas dalam lanskap linguistik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Abidah, R. A. A. A., Mazidah, E., & Masruroh, L. (2025). Linguistic Landscape at Malindo Swimming Pool: Patterns and Representation in a Multilingual Context. *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(2), 58-68.
- Alfaruqy, D., Sunarsih, S., Rohman, T. N., Cholifah, A. N., & Pustika, R. (2025). Pemberian Nama Pada Ruang Publik Di Kota Bandar Lampung: Perspektif Lanskap Linguistik. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, 2025*.
- Awaliyah, N. S., & Rohmah, N. (2025). Spelling Errors in Thesis of Elementary School Teacher Education Students PGRI Adi Buana University Surabaya Class of 2019. *Jurnal Disastri*, 7(2), 55-67.
- Ricardo, P., & Angelita, T. (2025). Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dalam Papan Nama Jalan dan Gedung di Kota Surakarta. *Polyglot: Journal of Linguistics, Literature, and Language Education*, 1(1), 45-53.
- Dewantara, I. P. M., Suandi, I. N., Putrayasa, I. B., & Rasna, I. W. (2018). Membangun Sikap Bahasa Positif terhadap Bahasa Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 2(2), 73-78.
- Erwina, E. (2024). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*. Penerbit Amerta Media.
- Herawati, L., & Mulyaningsih, I. (2019). Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Surat Resmi di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. *Indonesian Language Education and Literature*, 5(1), 114-124.



- Jendra, M. I. I., & Wiradnyana, I. M. (2023). Bilingual store names: A contact-linguistic landscape spectacle in Denpasar. *Journal of Applied Studies in Language*, 7(2), 153-165.
- Humaeroh, L. M., Hendaryan, H., & Hidayatullah, A. (2023). Penggunaan Bahasa Indonesia pada Penulisan Media Ruang Publik di Kecamatan Ciamis. *Diksatrasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 225-229.
- Fitriah, S., & Putri, A. K. (2023). Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik Taman Rimbo Jambi. *El Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 6(2), 23-31.
- Nurlaili, N., Wardani, V., Iqbal, M., & Chida, T. (2023). Analisis Ejaan Dan Diksi Dalam Berita Pada Majalah Tempo Edisi Maret 2022. *Education Enthusiast: Jurnal Pendidikan dan Keguruan*, 3(4), 7-23.
- Agustina, A., Nusi, A., Aditiawarman, M., & Nurizzati, N. (2024). Framework Model In Linguistic Landscape Strategies To Strengthen National Identity In Tourism Areas. *TELL-US JOURNAL*, 10(4), 914-927.
- Paryono, Y. (2013). Peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. *Madah: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 4(2), 163-173.
- Putri, A. Y., Purnomo, M. E., Sholikhah, H. A., & Salsabila, N. (2025). Dinamika Multibahasa di Ruang Publik Kota Palembang sebagai Cerminan Identitas dan Globalisasi: Kajian Lanskap Linguistik. *Linguistik Indonesia*, 43(2), 361-375.
- Melati, S. (2018). Perencanaan Bahasa Di Indonesia Dan Fungsinya Sebagai Pemersatu Keberagaman Bahasa. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Metalingua*, 3(2), 96-104.
- Subangun, S. (2023). Analisis Kesalahan Penggunaan Ejaan Surat Resmi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Tahun 2022. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 11(2), 247-257.
- Sucipta, I. M. D., Handayani, L. N. C., & Yuliantini, N. N. (2024, October). Analisis Kesalahan Berbahasa Teks Tertulis pada Media Informasi di Ruang Publik Lingkungan Desa Ungasan, Kabupaten Badung. In *Prosiding Seminar Nasional Riset Bahasa dan Pengajaran Bahasa* (Vol. 6, No. 1, pp. 108-121).
- Winarsih, E. (2022). *Problematis Bahasa Indonesia Kekinian (Pembinaan dan Pengembangan Bahasa)*. <http://eprint.unipma.ac.id/id/eprint/305>
- Wirahyuni, K. (2019). Penilikan kesalahan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks sosial-masyarakat di ruang publik. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 3(1), 68-76.
- Yudin, J., Nurjanah, A., & Widiastuti, D. I. (2024). Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. *PARADUTA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 31-38.

